

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN BONTO MAKKIO
KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :

NOPIYANTI

Nomor Stambuk : 105610489314



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PENGAJUAN SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN BONTO MAKKIO
KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

NOPIYANTI

Nomor Stambuk : 10561 04893 14

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung
Keluarga Berencana di Kelurahan Bonto Makkio
Kecamatan Rappocini Kota Makassar

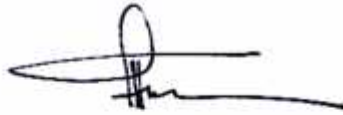
Nama Mahasiswa : Nopiyanti

Nomor Stambuk : 10561 04893 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

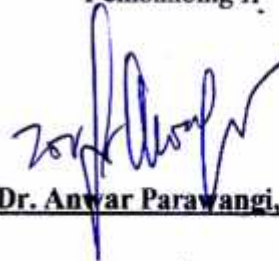
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II



Dr. Anwar Parawangi, M.Si

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Unismuh Makassar



Dr. Hj. Hyan Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara
Fisipol Unismuh Makassar



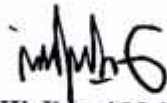
Nasrulhaq, S.Sos, MPA
NBM : 1067463

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/ Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0005/FSP/A.1-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)



(.....)

2. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si



(.....)

3. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si



(.....)

4. Nasrulhaq, S.Sos., MPA



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nopiyanti

Nomor Stambuk : 105610489314

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 14 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Nopiyanti

ABSTRAK

NOPIYANTI. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar. (dibimbing Oleh Jaelan Usman dan Anwar Parawangi).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dan dikembangkan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi pengambilan keputusan awal belum terlibat, namun dalam keputusan yang sedang berlangsung dan keputusan operasional sudah terlibat dengan baik. Dari pelaksanaan masyarakat sudah berkontribusi sumber daya dan menjadi peserta kegiatan Kampung KB. Dan dari evaluasi langsung masyarakat masih belum dilibatkan, namun dapat terlibat dalam evaluasi tidak langsung dengan memberikan penilaian dan saran terhadap program Kampung KB untuk perbaikan kegiatan yang akan datang.

Kata kunci : Partisipasi masyarakat, program Kampung KB

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar”.

Skripsi ini merupakan tugas yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Dr. Jaelan Usman, M.Si** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Anwar Parawangi, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrulhaq, S.Sos, M.PA selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan pemikiran Penulis.
5. Seluruh Staff Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta mendapat banyak ilmu baru darinya.
6. Seluruh Informan yang senantiasa membantu serta meluangkan waktu dan memberikan informasi sehingga membantu penulis dalam kelancaran penelitian.
7. Semua kerabat dan teman-teman mahasiswa FISIP Unismuh Makassar, terkhusus untuk Kelas B Angkatan 2014 yang telah memberikan semangat.
8. Kepada Sahabat ABG, SCB dan 3 Minions yang telah memberikan semangat dan mengajarkan tentang arti persaudaraan.
9. Kepada Randy Gunawan terima kasih atas segala motivasi, dukungan, dan bantuan baik moril maupun materil.
10. Teristimewa Ibunda Rosmiati dan Ayahanda Kamiluddin serta keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan yang begitu tulus.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 14 Januari 2019



Nopiyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Partisipasi Masyarakat	9
B. Kampung Keluarga Berencana	17
C. Kerangka Pikir	22
D. Fokus Penelitian	24
E. Deskripsi Fokus Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Profil Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar	36
C. Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar	46
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tabel Informan	29
Tabel 4.1. Wilayah Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar	33
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	34
Tabel 4.3. Sarana dan Prasarana Kelurahan Bonto Makkio.....	35
Tabel 4.4. Kelembagaan Masyarakat	36
Tabel 4.5. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar pada tahun 2017 Berdasarkan Tingkat Jenjang Pendidikan.....	45
Tabel 4.6. Data Pencapaian Peserta KB Aktif Kelurahan Bonto Makkio Tahun 2018.....	63

DAFTAR SINGKATAN

BKB	: Bina Keluarga Balita
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKL	: Bina Keluarga Lansia
BKR	: Bina Keluarga Remaja
DPPKB	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
IMP	: Implan
IUD	: <i>Intrauterine Device</i>
KB	: Keluarga Berencana
KDM	: Kondom
KKBPK	: Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
MKJP	: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
MOP	: Metode Operasi Pria
MOW	: Metode Operasi Wanita
PKB	: Penyuluh Keluarga Berencana
PLKB	: Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PUS	: Pasangan Usia Subur
RW	: Rukun Warga
STK	: Suntik
UPPKS	: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kependudukan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa negara khususnya di Indonesia. Permasalahan kependudukan menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks, permasalahan tersebut diantaranya pernikahan usia dini, angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang masih tinggi, dan masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk menjadi permasalahan kependudukan bisa menjadi sebuah masalah krusial yang tidak dapat dihindarkan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang terus menerus akan terjadi berbagai masalah, seperti masalah kualitas sumber daya manusia yang menurun, pengangguran, lapangan kerja, kejahatan, dan lainnya yang akan memberi dampak negatif bagi kehidupan di Indonesia khususnya.

Jumlah penduduk yang tinggi tentu bukan persoalan yang mudah dalam mengatasi persoalan kependudukan. Diperlukan usaha dan upaya yang berkelanjutan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan pembuatan kebijakan dari pemerintah yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk. Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam penanganan masalah kependudukan salah satunya dengan pencanangan Program Keluarga Berencana (KB). Namun program tersebut dirasa lambat laun melemah dari berbagai sudut persoalan, mulai dari pencapaian peserta KB yang mengalami penurunan dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program tersebut.

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar dengan jumlah penduduk yang tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kota Makassar memiliki jumlah penduduk sebesar 1.469.601 jiwa pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebesar 1.489.011 jiwa. Penduduk ini tersebar pada 15 kecamatan dan terdiri dari 153 kelurahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya. (Badan Pusat Statistik, 2018)

Tingginya jumlah penduduk kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar berupaya dalam menyukseskan program KB dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat terlibat secara partisipatif. Karena hal tersebut maka pemerintah kota Makassar telah melahirkan program yaitu Lorong KB yang digagas melalui Badan Keluarga Berencana (KB) yang tidak hanya untuk menurunkan fertilitas tetapi juga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Melalui Lorong KB yang bentuk, pemerintah berharap dapat menyentuh masyarakat lebih dekat agar dapat mengimplementasikan program-program pemerintah kota Makassar maupun program nasional. Saat ini jumlah Lorong KB yang tersebar di Makassar sebanyak 178 Lorong (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018). Berjalannya program Lorong KB Makassar yang menyentuh pada lini lapangan, menarik perhatian dari Presiden Republik Indonesia dan menjadikan program tersebut sebagai program percontohan nasional yang dinamakan Kampung KB.

Kampung KB merupakan suatu wadah untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta program pembangunan lainnya dilini

lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB, dan Surat Kepala BKKBN Pusat No. 046/BL/200/B4/2016 Tanggal 12 Januari 2016 Perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB di seluruh Indonesia, maka melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang memiliki visi “menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas” memiliki kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk terwujudnya cita-cita pembangunan Indonesia yang terdapat dalam Nawacita terutama pada agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, serta agenda prioritas ke 5 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia” dan agenda prioritas ke 8 yaitu “Melakukan revolusi karakter bangsa”, BKKBN diberi mandat oleh Presiden RI agar mengimplementasikan program Kampung KB.

Pencanaan Kampung KB dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2016 oleh Presiden RI di Dusun Jenawi Kabupaten Cirebon. Kampung KB adalah satuan wilayah yang setingkat RW, dusun atau setara, dengan kriteria tertentu, terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. (BKKBN, 2015).

Kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya berperan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk serta tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi Kampung KB merupakan program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Kampung KB merupakan suatu wadah yang dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dengan berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, perilaku dan cara berfikir (*mindset*) masyarakat kearah yang lebih baik. Melalui program ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan Kampung KB sebagai program prioritas di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya mengoptimalkan peran pemerintah daerah agar ikut andil dalam pelaksanaan program ini serta dapat bersentuhan langsung dan memberikan manfaat pada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. BKKBN akan bekerjasama dengan Kementerian, lembaga terkait serta organisasi lintas sektor dalam pengembangan Kampung KB kedepan.

Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2650/BL-102/J5/2016 Tanggal 12 Januari 2016 perihal Pembentukan Kampung KB serta Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menjelaskan tentang kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam pelaksanaan Kampung KB dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB Kota Makassar Nomor 476/759 S.KEP/XI /2016, maka Kota Makassar mencanangkan Program Kampung KB dengan saat ini jumlahnya sebanyak 15 Kampung KB.

Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam Kampung KB yaitu kegiatan dari lintas sektor dan kegiatan dari sisi ketahanan keluarga, seperti pembentukan serta pengembangan kelompok-kelompok kegiatan, diantaranya: Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan kelompok dengan upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta keterampilan ibu maupun anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balita yang dimiliki dalam keluarga. Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan program yang mengupayakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan. Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan program dengan serangkaian kegiatan dilakukan untuk peningkatan pengetahuan, dan keterampilan keluarga yang lanjut usia dalam perawatan, pengasuhan serta pemberdayaan lansia. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang terdiri dari berbagai segmen, seperti Keluarga Sejahtera. Adapun Program-program pemerintah Kota Makassar yang bersinergi dalam Kampung KB diantaranya Lorong Garden, Makassar' Tidak Rantasa, Badan Usaha Lorong (Bulo) dan lain-lain.

Prasyarat wajib dalam pembentukan Kampung KB yang harus dipenuhi yaitu adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah, ketersediaan data dan informasi kependudukan yang akurat dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini yaitu dukungan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat,

tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di kampung KB secara berkesinambungan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumardi dalam Andreeyan, 2014).

Partisipasi masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan program Kampung KB tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi peran seluruh komponen masyarakat juga mempengaruhi. Kampung KB sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK dan program-program pembangunan lainnya yang telah disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Adanya partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB akan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor, mensejahterakan masyarakat dan membangun masyarakat berbasis keluarga.

Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini merupakan salah satu wilayah pencahangan program Kampung KB di Kota Makassar. Penelitian ini

dilakukan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio terkait Program Kampung KB yang pada awalnya merupakan kelurahan padat penduduk, kumuh, selain itu kurangnya pengetahuan pasangan usia subur tentang alat kontrasepsi, tingkat kesertaan ber-KB masih rendah serta kurangnya partisipasi masyarakat mengenai program-program pemerintah kota Makassar.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam evaluasi program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam evaluasi program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang mengkaji partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kampung Keluarga Berencana.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai motivasi bagi pemerintah maupun non pemerintah dalam membangun kerjasama dalam pelaksanaan program Kampung KB.
 - b. Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan instansi terkait maupun *stakeholder* lainnya terhadap bentuk partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi secara umum diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Verhagen (Mardikanto dan Poerwoko, 2015) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggungjawab dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai :

- 1) Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki;
- 2) Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri;
- 3) Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan;
- 4) Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Partisipasi masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bryant dan White (Muluk, 2007) telah menggambarkan pengertian partisipasi yang mendalam pada bidang administrasi pembangunan sebagai

partisipasi oleh masyarakat atau penerima manfaat suatu proyek dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian Bryant dan White menguraikan kandungan makna dalam pengertian partisipasi ini bahwa partisipasi merupakan sebuah sikap yang terbuka terhadap persepsi maupun ide, memberikan perhatian yang mendalam mengenai hasil dari suatu proyek yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, dan memiliki kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan pihak lain terhadap suatu kegiatan.

Partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program akan mengembangkan kemandirian pada masyarakat demi kemajuan pembangunan. Selain itu, penerimaan manfaat merupakan pelengkap dari cakupan pada proses perencanaan dan pelaksanaan sehingga akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Griesgraber dan Gunter (Muluk, 2007) mengartikan partisipasi sebagai “mekanisme untuk memungkinkan orang-orang yang terkena dampak untuk berbagi dalam pembuatan proyek atau program, dimulai dengan identifikasi semua jalan sampai ke implementasi dan evaluasi”. Sedangkan partisipasi menurut Webster (Arzaq dan Tauran, 2015) merupakan tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan yang dimaksud memperoleh manfaat. Dengan demikian, konsep partisipasi menjadi semakin luas mulai dari aspek perencanaan, implementasi, evaluasi, sampai penerimaan manfaat.

Partisipasi menurut Isbandi (Widodo, 2015) merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dalam

masyarakat, mengambil keputusan dan memilih alternatif sebagai solusi dalam penanganan masalah, melaksanakan alternatif yang dipilih, dan melibatkan masyarakat dalam proses perubahan yang terjadi.

Dedi Mulyadi (Igrisia, 2008) menjelaskan dua makna partisipasi, yaitu partisipasi instrumental dan partisipasi transformasional. Partisipasi disebut instrumental ketika dipandang sebagai cara untuk mencapai sasaran tertentu untuk proyek pembangunan, partisipasi transformasional jika dilihat dari cara atau sarana yang bertujuan memberdayakan masyarakat. Dalam partisipasi instrumental, inisiatif pelaksanaan proyek atau aktifitas misalnya datang dari pihak luar, sedangkan masyarakat ikut dalam bentuk kemitraan, tujuan pelaksanaan proyek tersebut ialah kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan, dan tujuan partisipasi masyarakat didalamnya ialah pencapaian saran-saran proyek tersebut secara efektif dan efisien. Asumsi partisipasi semacam ini ialah bahwa para perencana lebih tahu apa yang terbaik bagi masyarakat, dan masyarakat tinggal melaksanakannya secara bersama-sama serta menikmati hasilnya. Dengan kata lain proses pengambilan kebijakan berlangsung dari ke atas ke bawah (*top down*).

Partisipasi transformasi masyarakat terlibat sebanyak mungkin dalam pelaksanaan suatu proyek atau aktifitas, mulai tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Suatu proyek atau aktifitas merupakan pencerminan kehendak masyarakat, dan proses pengambilan kebijakan berlangsung dari bawah ke atas (*bottom up*). Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran suatu proyek sebagian besar bergantung pada masyarakat sendiri. Dengan demikian, selain memiliki kemampuan dan

kemandirian yang semakin tinggi, masyarakat akan memiliki tanggungjawab lebih besar. Dalam partisipasi semacam itu, masyarakat diandaikan lebih tahu apa yang terbaik bagi diri mereka. Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam partisipasi transformasional tersebut, maka partisipasi bisa dipahami sebagai proses sekaligus cara bagi para *stakeholders* dalam mempengaruhi dan berbagi peran atas perkara pembangunan, proses pengambilan kebijakan dan sumberdaya yang dimaksud dengan para *stakeholders* yang dimaksud adalah masyarakat umum.

Partisipasi masyarakat menurut Sumardi (Andreeyan, 2014) berarti “peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan dalam bentuk memberikan pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, hal ini dapat berupa memberi masukan pikiran, tenaga, keahlian, waktu, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.”

Yadav (Kristiniati dan Choiriyah, 2014) menambahkan adanya empat partisipasi yang menunjuk dalam kegiatan pembangunan yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Sedangkan menurut Mubyarto (Putri, 2010) partisipasi masyarakat yaitu suatu komitmen dalam membantu keberhasilan suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan sendiri.

Partisipasi dibutuhkan agar sinergitas antara pemerintah dan masyarakat terjalin dengan baik dalam pencapaian tujuan kebijakan. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kepedulian dan kesadaran serta tanggungjawab

masyarakat terhadap pentingnya program dari pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka.

Dusseldorp (Mardikanto dan Poerwoko, 2015) mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat, yakni :

1. Menjadi anggota dalam kelompok-kelompok masyarakat;
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat;
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Sulaiman (Paath, 2013) membagi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menjadi lima, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
2. Partisipasi langsung dalam kegiatan secara fisik dan tatap muka.
3. Partisipasi representatif yaitu dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil dalam organisasi atau panitia.
4. Partisipasi dalam bentuk dukungan dapat berupa keterlibatan mental, emosional individu dan motivasi untuk memberikan kontribusi tergerak dalam bentuk buah pikiran, tenaga, barang dan jasa yang merupakan hak dasar yang sah bagi setiap individu dalam kesediaanya untuk turut serta menentukan keberhasilan suatu program pembangunan.

5. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yaitu memanfaatkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

Cohen dan Uphoff (Kalesaran dkk, 2015) membagi partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu partisipasi yang berkaitan tentang pemberian gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.

Ada tiga jenis keputusan:

- a. Keputusan Awal (*Initial Decisions*), keputusan awal diawali dengan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada pada masyarakat kemudian diberikan suatu solusi atas permasalahan tersebut. Keputusan awal ini mencakup pada gagasan, formulasi, perumusan rencana dan lainnya dalam menunjang pelaksanaan suatu program.
- b. Keputusan yang sedang Berlangsung (*On going Decisions*), keputusan yang sedang berlangsung terjadi setelah keputusan awal telah dibuat. Ada kemungkinan bahwa penduduk setempat yang tidak berpartisipasi dalam keputusan awal mungkin akan diminta berpartisipasi dalam keputusan yang sedang berlangsung begitu proyek telah tiba di wilayah tersebut. Partisipasi dalam keputusan yang sedang berlangsung untuk mengetahui kebutuhan dan prioritas baru yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Keputusan Operasional (*Operational Decisions*), keputusan operasional terkait dengan organisasi yang dibentuk berperan untuk melibatkan

masyarakat dalam pencapaian suatu program. Partisipasi ini berkaitan dengan hal-hal seperti komposisi keanggotaan, prosedur rapat, pemilihan kepemimpinan dan lainnya.

- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam aspek implementasi dalam tiga cara utama yaitu kontribusi sumber daya, upaya administrasi dan koordinasi dan program kepesertaan.
 - a. Kontribusi Sumber Daya (*Resource Contributions*) ada berbagai bentuk, seperti penyediaan tenaga kerja, uang, barang material, dan informasi. Semua input tersebut sangat penting untuk sebuah program pembangunan. Melalui partisipasi tersebut, masyarakat setempat dapat berkontribusi tenaga kerja untuk melakukan kegiatan fisik, menyumbangkan alat untuk kegiatan atau memberikan informasi penting tentang topik seperti hasil dari program atau masalah yang dihadapi dan sebagainya.
 - b. Upaya Administrasi dan koordinasi (*Administration and co-ordination efforts*) adalah cara kedua masyarakat dapat terlibat dalam implementasi proyek. Disini mereka dapat berpartisipasi sebagai lokal dipekerjakan karyawan atau sebagai anggota atau pengambil keputusan proyek. Mereka juga dapat menjadi anggota asosiasi sukarela yang memainkan peran dalam mengoordinasi kegiatan mereka dengan proyek tersebut.
 - c. Program Kepesertaan Kegiatan (*Programme Enlistment Activities*) merupakan bentuk partisipasi implementasi yang paling umum. Menjadi peserta dalam program sangat penting untuk melihat manfaat yang disediakan, karena pendaftaran tidak selalu menjamin manfaat.

- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dapat dilihat dari tiga macam manfaat yaitu materi, sosial dan pribadi. Manfaat material pada dasarnya adalah barang pribadi yang menghasilkan dari suatu proyek. Manfaat sosial pada dasarnya adalah barang publik. Manfaat ini biasanya dicirikan sebagai layanan atau fasilitas seperti sekolah, klinik kesehatan dan jalan yang baik. Manfaat pribadi bukan berarti manfaat secara individu, keuntungan pribadi dalam hal ini seperti kepada anggota kelompok atau sektor karena ini memperoleh kekuatan sosial dan politik yang lebih banyak melalui pengoperasian proyek.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi, yaitu mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap ini sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan program ataupun kegiatan selanjutnya. Terdapat dua tipe partisipasi dalam evaluasi program yaitu dengan partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung.
 - a. Partisipasi Langsung, dalam suatu proyek orang-orang lokal atau pemimpin lokal dapat berpartisipasi. Pegawai pemerintah dapat berpartisipasi dalam tinjauan anggaran tahunan yang memenuhi fungsi evaluatif tertentu, tetapi pejabat tingkat lokal umumnya tidak terlibat. Sangat mungkin bahwa apapun upaya dan keterlibatan lokal dalam evaluasi program akan terjadi melalui kegiatan politik atau sejenisnya.
 - b. Partisipasi tidak Langsung, adalah partisipasi dalam kegiatan evaluatif yang bertujuan untuk mengupayakan memberikan pendapat yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari sebuah program untuk menyarankan beberapa perbaikan.

Slamet (Mardikanto dan Poerwoko, 2015) berpendapat bahwa ada tiga unsur pokok yang sangat menentukan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi;
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi;
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Goldsmith dan Blustain (Anwar, 2009) dalam penelitiannya di Jamaica memberikan kesimpulan bahwa masyarakat akan berpartisipasi jika : partisipasi akan dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau telah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan, partisipasi itu dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, manfaat yang diperoleh dalam partisipasi tersebut dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat, dan dalam proses partisipasi itu masyarakat terjamin dapat melakukan kontrol. Partisipasi masyarakat ternyata dapat berkurang jika mereka tidak ataupun kurang berperan dalam proses pengambilan keputusan.

B. Kampung Keluarga Berencana

Amanat Presiden Republik Indonesia, kepada BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan atau sebuah program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019. Kampung KB mencoba memadukan konsep pembangunan terpadu bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program tersebut dapat bersentuhan secara langsung dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh

tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). (BKKBN, 2017).

Kampung KB merupakan program nasional dengan inovasi yang berawal dari Lorong KB yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar. Lorong KB merupakan program Badan Keluarga Berencana (KB) Kota Makassar yang menjadi program percontohan nasional. Pada tanggal 14 Januari 2016, Presiden RI telah mencanangkan Kampung KB di Dusun Jenawi Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupten Cirebon. Untuk pelaksanaannya, maka BKKBN akan bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait serta organisasi lintas sektoral untuk pengembangan Kampung KB.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. (BKKBN, 2015). Dibentuknya program kampung KB memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) serta pembangunan lintas sektor untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.

Adapun tujuan dari Kampung KB dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1. Tujuan Umum

Secara umum, Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta

pembangunan lintas sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam mendampingi dan membina serta memfasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan program KKBPK dan pembangunan lintas sektor terkait, memberikan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern, meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja, meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung, meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih, meningkatkan kualitas keimanan para remaja atau mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah atau ceramah keagamaan) di kelompok remaja, dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja atau mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) di kelompok pelajar dan seterusnya.

Syarat dibentuknya kampung KB pada suatu wilayah, pada dasarnya ada tiga hal pokok yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu : tersedianya data kependudukan yang akurat, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah, dan adanya partisipasi aktif masyarakat.

Pemilihan dan penentuan wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB, memiliki tiga kriteria yang akan dipakai :

1. Kriteria utama : yang mencakup dua hal:
 - a) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa atau kelurahan di kampung tersebut.
 - b) Jumlah peserta KB berada di bawah rata-rata dalam pencapaian peserta KB tingkat desa atau kelurahan di lokasi kampung KB tersebut.
2. Kriteria wilayah: mencakup 10 kategori wilayah yang dapat memilih salah satu atau lebih kriteria wilayah berikut: (1) Wilayah Kumuh, (2) Pesisir, (3) Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5) Wilayah terpencil, (6) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan), (7) Perbatasan, (8) Kawasan Industri, (9) Kawasan Wisata, dan (10) Padat Penduduk.
3. Kriteria Khusus : kriteria yang mencakup 5 hal, yaitu :
 - a) Kriteria data meliputi data dan peta keluarga yang dimiliki setiap RT/RW;
 - b) Kriteria kependudukan meliputi angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah;
 - c) Kriteria program KB meliputi peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari pencapaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan serta tingkat *unmet need* lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa atau kelurahan;
 - d) Kriteria program pembangunan keluarga meliputi partisipasi keluarga dalam membina ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan

partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R yang masih rendah;

- e) Kriteria program pembangunan lintas sektor yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang pemukiman dan lingkungan, dan program lainnya yang bisa ditambah sesuai dengan kondisi dan perkembangan di suatu wilayah kampung KB.

Sasaran kegiatan merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB, yaitu keluarga, remaja, Penduduk Lanjut Usia (Lansia), Pasangan Usia Subur (PUS), keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja serta keluarga yang memiliki lansia, dan sasaran sektor sesuai dengan tugas di masing-masing bidang. Pelaksananya adalah Kepala Desa atau Lurah, Ketua RW, Ketua RT, Penyuluh KB, Petugas lapangan sektor terkait, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.

Melalui Kampung KB ini diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan lintas sektor lainnya dapat berjalan secara terpadu atau terintegrasi dan bersinergi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Pembangunan kependudukan akan lebih baik jika dimulai dari wilayah pinggiran yaitu kampung. Adapun Agenda prioritas

ke 5 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia”. Dan agenda prioritas ke 8 yaitu “Melakukan revolusi karakter bangsa”. Dalam dimensi pembangunan manusia diperlukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Kampung KB, yaitu:

1. Kependudukan
2. Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
3. Ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga (pembangunan keluarga)
4. Kegiatan lintas sektor (bidang kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan lainnya sesuai kebutuhan wilayah Kampung KB)

C. Kerangka Pikir

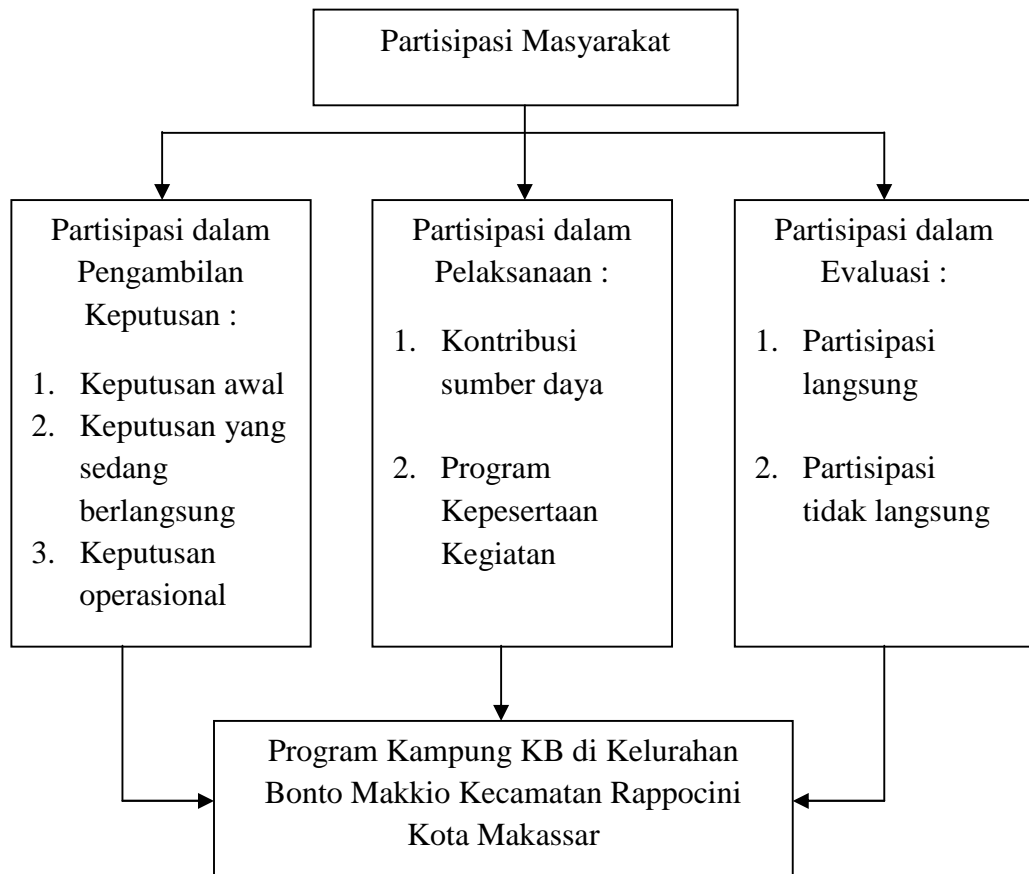
Kampung KB merupakan suatu program pemerintah sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pembangunan lintas sektor yang terkait. Program ini merupakan program pembangunan yang berintegrasi dengan berbagai program lainnya. Melalui Kampung KB, pemerintah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan meningkatkan peran serta pemerintah maupun non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan dalam Kampung KB ini yaitu melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta kegiatan lintas sektor, hal ini tentunya membutuhkan semua pihak

untuk berpartisipasi dalam keberhasilan Kampung KB. Partisipasi masyarakat merupakan hal utama dalam keberhasilan program Kampung KB. Partisipasi sangat dibutuhkan agar sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.

Ada beberapa jenis partisipasi masyarakat yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, dan partisipasi dalam evaluasi. Untuk mencapai keberhasilan program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung.

Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB sebagai mitra untuk masyarakat yang bersangkutan. Tujuan partisipasi masyarakat didalamnya ialah pencapaian sasaran proyek tersebut secara efektif dan efisien. Adapun aspek yang akan dilihat dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pemberian gagasan atau ide yang menyangkut tentang kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Ada tiga jenis keputusan :
 - 1) Keputusan Awal (*Initial Decisions*)

Keputusan awal dalam hal ini yaitu mencakup pada strategi, tujuan, gagasan, formulasi, perumusan rencana dan lainnya dari program Kampung KB.

2) Keputusan yang sedang Berlangsung (*On going Decisions*)

Partisipasi dalam keputusan yang sedang berlangsung untuk mengetahui kebutuhan dan prioritas baru di Kelurahan Bonto Makkio yang memungkinkan akan dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program Kampung KB dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3) Keputusan Operasional (*Operational Decisions*)

Keputusan operasional terkait dengan struktur organisasi yang dibentuk berperan untuk melibatkan masyarakat dalam pencapaian suatu program. Partisipasi ini berkaitan dengan hal-hal seperti komposisi keanggotaan, prosedur rapat, pemilihan kepemimpinan dan lainnya dalam program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar.

- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menjalin kemitraan dan saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Terdapat tiga cara utama untuk berpartisipasi dalam aspek implementasi :

1) Kontribusi Sumber Daya (*Resource Contributions*)

Kontribusi sumber daya dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti kontribusi tenaga, uang, materi, dan informasi dalam pelaksanaan program Kampung KB.

2) Program Kepesertaan Kegiatan (*Programme Enlistmen Activities*)

Kepesertaan kegiatan yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara menjadi peserta dalam kegiatan yang dilaksanakan pada program Kampung KB.

c. Partisipasi dalam evaluasi yaitu masyarakat ikut serta dalam mengevaluasi program Kampung KB untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya guna perbaikan pelaksanaan program selanjutnya. Ada dua kegiatan untuk berpartisipasi dalam evaluasi:

1) Partisipasi Langsung

Partisipasi langsung dalam evaluasi yaitu apakah masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengevaluasi Kampung KB

2) Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi tidak langsung yaitu masyarakat berpartisipasi dalam hal memberikan opini agar pemerintah mendapatkan gambaran tentang hasil dan manfaat serta perkembangan kegiatan yang dilakukan di Kampung KB.

2. Program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar ini adalah suatu program yang berada dalam satuan wilayah setingkat RW, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan yang dimulai tanggal 16 Agustus sampai 16 Oktober 2018. Adapun lokasi atau tempat penelitian dilaksanakan di RW 06 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang menjadi lokasi Kampung KB. Serta untuk mempermudah dalam memperoleh data dari instansi terkait seperti Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dan Balai KB Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif adalah peneliti sendiri. Peneliti merupakan *key instrumen*, teknik pengumpulan yang akan digunakan yaitu dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan dokumen resmi lainnya. Rumusan masalah pada penelitian ini dijawab melalui pendekatan kualitatif.

Sugiyono (Agustinova, 2015) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, kemudian digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan yang sebagai instrumen kunci adalah peneliti, dalam pengambilan *sample* sumber dan data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*,

teknik pengumpulan data di lakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek-subyek penelitian, berdasarkan fakta-fakta yang nyata atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci, dan mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku.

C. Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat dan *stakeholders* yang mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam program kampung KB.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Sumber data sekunder dalam hal ini diperoleh dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan sebagai salah satu sumber data yang urgen terhadap penelitian harus menggunakan teknik yang tepat. Teknik pemilihan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh akan lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten di bidangnya.

Pada pelaksanaan penelitian ini yang dijadikan informan adalah orang yang dianggap layak dan mengetahui partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB. Adapun informan pada penelitian ini, yaitu :

Tabel 3.1. Tabel Informan

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	H. Spardin Tompo	ST	PKB DPPKB	1 Orang
2.	Andi Bode	AB	Ketua Balai KB Rappocini	1 Orang
3.	Zulfa, S.sos	ZA	PLKB Bonto Makkio	1 Orang
4.	Suhaeni	SH	Petugas Posyandu	1 Orang
5.	Jumarnaini	JM	Tokoh Masyarakat (Pengurus Pokja Kampung KB)	1 Orang
6.	Nur Indah Yusuf	NIY	Tokoh Masyarakat (Kader KB)	1 Orang
7.	Sari	SR	Tokoh Masyarakat	1 Orang
8.	A. Nur Fatma	NF	Tokoh Masyarakat	1 Orang
9.	Daeng Jinne	DJ	Tokoh Masyarakat	1 Orang
Jumlah				9 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan melalui pengamatan langsung pada objek penelitian. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis. Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya tentang partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses dalam memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) mengenai partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar. Tujuan penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, yang meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, instruksi, majalah, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, berita yang disiarkan di media massa dan data yang relevan dengan penelitian. Maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan meneliti catatan-

catatan penting atau keadaan yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada model Miles dan Huberman (Usman dan Akbar, 2009) yang terjadi secara bersamaan, terdiri atas tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan dengan pemusatan perhatian, pengabstrakkan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Data yang didapat dilapangan akan diketik ataupun ditulis secara sistematis setiap selesai dalam mengumpulkan data. Laporan-laporan tersebut itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok atau inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data diartikan sebagai suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengkategorisasikan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga data yang terkumpul dapat diverifikasi. Data yang terkumpul tersebut kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif.

2. Penyajian Data

Penyajian data dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu serta mudah dipahami. Penyajian data diartikan sebagai pendeskripsian berbagai informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir atau hasil dari reduksi data dan penyajian data. Data yang telah didapatkan kemudian di ambil kesimpulan dengan mencari makna dari data yang diperoleh. Penelitian perlu di verifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

G. Keabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik triangulasi:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan pengecekan data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi atau teknik lain tetapi dengan waktu atau situasi yang berbeda dan dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Luas Wilayah Kelurahan Bonto Makkio

Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar secara geografis sekitar 24 Ha dan dibagi menjadi 6 RW dan 24 RT. Pelaksanaan Program Kampung KB Kelurahan Bonto Makkio berada pada wilayah RW 06. Pada tahun 2017, RW 06 meraih peringkat 2 nasional dalam pemenang terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat tingkat nasional (matarakyatmu.com, 2017).

Tabel 4.1. Wilayah Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar

No.	Keadaan Kelurahan	Luas/ Jumlah
1	Luas wilayah	24 Ha
2	Jumlah Penduduk	4.372 Jiwa
3	Jumlah KK	1.014
4	Jumlah RW	6 RW
5	Jumlah RT	24 RT
6	Jumlah Lorong	38 Lorong
7	Jumlah Lorong KB	26 Lorong
8	Jumlah Lorong Garden	7 Lorong
9	Jumlah Lorong Bulu	5 Lorong

(Sumber: Data Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini, 2018)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa luas wilayah yang dimiliki Kelurahan Bonto Makkio yaitu 24 Ha dengan jumlah penduduknya sebanyak

4.372 Jiwa. Ada terdapat 38 Lorong di Kelurahan Bonto Makkio yang ditata melalui program kerja dari pemerintah kota Makassar, diantaranya Lorong KB sebanyak 26 Lorong, Lorong Garden sebanyak 7 Lorong, dan Bina Usaha Lorong (Bulo) sebanyak 5 Lorong. Lorong merupakan suatu tempat yang dapat menyentuh dengan dekat oleh pemerintah untuk itu pemerintah kota Makassar banyak melaksanakan program-program untuk diimplementasikan di Lorong-lorong di Kota Makassar. Hal ini dikarenakan bahwa untuk membangun kota yang berstandar internasional dapat diwujudkan melalui pemberdayaan ditempat-tempat pinggiran seperti lorong.

Adapun lokus dalam penelitian ini yang lebih spesifik yang menjadi sasaran penulis yaitu terletak di RW 06 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.112 Jiwa
2	Perempuan	2.260 Jiwa
Jumlah		4.372 Jiwa

(Sumber: Data Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini, 2018)

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah penduduk perempuan. Jumlah dari penduduk perempuan adalah sebanyak 2.260 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk perempuan dapat dilihat dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki yaitu dengan perbedaan 148 jiwa. Sehingga jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.112

jiwa. Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dari Kelurahan Bonto Makkio yaitu sebanyak 4.372 Jiwa.

2. Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini

Tabel 4.3. Sarana dan Prasarana Kelurahan Bonto Makkio

No	Sarana	Jumlah
1	Masjid	7 Masjid
2	Gereja	1 Gereja
3	Poskamling	6 Poskamling
4	Posyandu	6 Posyandu
5	Lapangan	1 Buah
6	TK / Playgroup	3 Sekolah
7	SD Negeri/ Swasta	5 Sekolah
8	SMP	1 Sekolah
9	SMA/SMK	2 Sekolah
10	Taman Baca	1 Buah

(Sumber: Data Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini, 2018)

Berdasarkan tabel 4.3. diatas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Bonto Makkio yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Diantaranya tempat ibadah seperti Masjid sebanyak 7 buah, dan 1 buah Gereja. Untuk menciptakan suasana yang aman, didirikanlah poskamling sebanyak 6 buah. Sementara itu, pelayanan kesehatan posyandu terdapat 6 buah. Agar masyarakat dapat menyalurkan aktivitas olah raga maka dibuatkan sebuah lapangan yang dapat dipakai oleh masyarakat. Terdapat

juga beberapa sekolah diantaranya TK sebanyak 3 buah, SD sebanyak 5 buah, SMP sebanyak 1 buah, dan SMA sebanyak 2 buah.

Tabel 4.4. Kelembagaan Masyarakat

No	Lembaga Masyarakat	Organisasi
1	Organisasi Kemasyarakatan	LPM
		BKM-PNPM Mandiri Perkotaan
		KADARKUM
		Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat
2	Organisasi Perempuan	Tp. PKK
3	Organisasi Keagamaan	6 Majelis Taklim
		PERMATA (Persatuan Majelis Taklim)
		PHBI
4	Organisasi Pemuda	Karang Taruna
		Remaja Masjid

(Sumber: Data Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini, 2018)

Organisasi Kemasyarakatan di bentuk pada wilayah kelurahan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dan memiliki berbagai kegiatan yang berbeda-beda dalam pencapaian tujuannya.

B. Profil Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar

1. Gambaran Umum

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan

Daerah. DPPKB Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pada BAB IV Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 5 Huruf d Poin 14 “Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”

Dibentuknya DPPKB sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Penduduk merupakan titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana dalam segala bidang untuk menciptakan perkembangan ideal antara perkembangan kependudukan dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 95 Tahun 2016. DPPKB dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

Tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar yaitu :

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 95 Tahun 2016 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar mempunyai tugas membantu

Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 5) Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Visi dan Misi

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar memiliki visi :

“Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera”.

Adapun misi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar :

- 1) Mengembangkan jejaring pelayanan keluarga berencana yang berorientasi pada akses pelayanan terjangkau, kepuasan, konsumen secara berkesinambungan.
- 2) Menyiapkan dan melaksanakan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan reproduksi.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan program keluarga berencana.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, terdiri dari :

a) Kepala Dinas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

b) Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Dinas.

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas. Fungsi dari Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, antara lain :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan memiliki tugas untuk melakukan administrasi dan akuntansi keuangan. Fungsi Subbagian Keuangan, yaitu :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
- b. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas yaitu melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- b. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

c) Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk di Kota Makassar.

1) Kasi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan

Kasi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

2) Kasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Kasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

3) Kasi Data dan Informasi

Kasi data dan informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

d) Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana.

1) Kasi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon

Kasi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi (Alkon).

2) Kasi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Kasi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan Keluarga Berencana.

3) Kasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana

Kasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB.

e) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

1) Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera.

2) Kasi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

Kasi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia.

3) Kasi Bina Ketahanan Remaja

Kasi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.

f) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan penggerakan.

1) Kasi Penyuluhan dan KIE

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE.

2) Kasi Advokasi dan Penggerakan

Kasi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.

3) Kasi Pendayagunaan PKB/PLKB

Kasi Pendayagunaan PKB/PLKB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) /Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);

g) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h) Unit pelaksana teknis

Di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dibentuk unit pelaksana teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Makassar. Dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompoten agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu Walikota dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di bidang urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan dukungan sumber daya manusia yang berkompoten serta dukungan kapasitas asset/modal. Adapun Sumber daya aparatur dan sumber daya asset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar sampai dengan tahun 2017.

Tabel 4.5. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar pada Tahun 2017 Berdasarkan Tingkat Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan						
No.	Jenjang	PNS		Tenaga Kontrak		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	Program S2	11	26	0	0	37
2.	Program S1	30	80	8	9	127
3.	Program D3	0	7	0	3	10
4.	SLTA	4	6	10	15	42
Jumlah		45	119	18	27	209

(sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar, 2017)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga kontrak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar sebanyak 209 orang. Jenjang pendidikan Program S2 hanya ada pada PNS yang berjumlah 37 orang, sedangkan untuk jenjang pendidikan Program S1 PNS sebanyak 110 orang, dan tenaga kontrak sebanyak 17 orang. Sedangkan untuk kualifikasi pendidikan Diploma sebanyak 7 orang PNS dan 3 orang tenaga kontrak. Dan untuk yang berlatar pendidikan SLTA sebanyak 42 orang.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar

Keberhasilan program Kampung KB tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi peran seluruh komponen masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan tonggak utama dalam upaya pencapaian sasaran program pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Partisipasi aktif masyarakat terhadap suatu program akan meningkatkan kelancaran dari suatu program tersebut. Adanya partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB akan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor, mensejahterakan masyarakat dan membangun masyarakat berbasis keluarga.

Partisipasi masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kampung KB sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga (KKBPk) dan program-program pembangunan lainnya yang telah disesuaikan pada wilayah Kelurahan Bonto Makkio.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yaitu berkaitan tentang pemberian gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama dalam pencapaian program Kampung KB Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar.

a. Keputusan Awal (*Initial Decisions*)

Keputusan awal diawali dengan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada pada masyarakat kemudian diberikan suatu solusi atas permasalahan tersebut. Keputusan awal ini mencakup pada gagasan, formulasi, perumusan rencana dan lainnya dalam menunjang pelaksanaan dari program Kampung KB.

Berikut pernyataan yang diberikan oleh informan ST terkait dengan pengambilan keputusan awal pada Program Kampung KB :

“sebenarnya untuk wilayah perencanaan itu sudah ada dari pemerintah kota. Jadi dia sifatnya vertikal, dari atas kebawah. Bukan dari bawah ke atas. Kampung KB dibentuk karena kan disana peserta KB nya rendah, kedua melihat kondisi wilayahnya yang agak jorok, kepedulian terhadap lingkungan, sehingga keberadaan Kampung KB kita harapkan peserta KB nya meningkat, keterlibatan mereka dalam program pembangunan juga meningkat”. (wawancara tanggal 20 September 2018)

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) telah mencanangkan program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 95 Tahun 2016 dalam pelaksanaan tugasnya menggunakan metode *top down*, dengan DPPKB mempunyai kedudukan tinggi mengenai cakupan masalah Keluarga Berencana. Kemudian DPPKB

menurun ke PLKB di Kelurahan Bonto Makkio untuk melaksanakan program Kampung KB secara teknis. Hal ini berarti bahwa dalam pengambilan keputusan awal masyarakat belum dilibatkan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan oleh informan AB :

“partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan awal pembentukan Program Kampung KB tidak dilibatkan, namun ketika Program Kampung KB dibentuk pada wilayah yang telah memenuhi kriteria untuk pembentukan Kampung KB masyarakat akan dilibatkan untuk sama-sama membangun Kampung KB diwilayahnya tersebut.” (wawancara tanggal 01 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa pembentukan Program Kampung KB tidak melibatkan masyarakat namun akan dilibatkan pada pelaksanaan demi kesuksesan Kampung KB. Masyarakat memberikan pengaruh terhadap suatu program untuk membangun lingkungan mereka kearah yang lebih baik. Masyarakat merupakan tonggak utama dalam menunjang keberhasilan suatu program. Dalam program Kampung KB ini yang tidak hanya merupakan suatu bentuk pemasangan alat kontrasepsi namun juga kegiatan lintas sektor lainnya.

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) oleh informan ZA yang mengatakan :

“partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan awal, sebenarnya ini tidak dilakukan dikarenakan ini sudah ada petunjuk teknis dari BKKBN untuk membentuk Kampung KB kemudian untuk data dari BKKBN Provinsi sudah ada memang masuk dari Kementerian Desa dalam kategori desa-desa di Sul-Sel yang sangat tertinggal untuk dibentuk Kampung KB, hanya untuk saat ini kalau khusus Makassar hanya ada satu Kampung KB yang mewakili setiap Kecamatan di Kota Makassar.” (wawancara tanggal 02 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan tidak ada karena telah ada petunjuk

teknis mengenai Kampung KB. Dan untuk pelaksanaannya memiliki kriteria tertentu untuk dijadikan sebagai Kampung KB dengan mengambil data desa tertinggal dari Kementerian Desa.

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Bonto Makkio yaitu informan DJ mengatakan bahwa :

“kami hanya tahu ketika Pak RW mengajak untuk membenahi lingkungan karena akan ada pembentukan Kampung KB di wilayah kami”
(wawancara 05 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa masyarakat kelurahan Bonto Makkio baru mengetahui akan ada pembentukan Kampung KB ketika telah adanya pemberitahuan dari pemerintah setempat.

Pengambilan keputusan awal dalam program Kampung KB Kelurahan Bonto Makkio masyarakat belum dilibatkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program Kampung KB Kota Makassar menggunakan metode dari atas kebawah yaitu berawal dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memiliki kedudukan tinggi mengenai Keluarga Berencana di Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2650/BL-102/J5/2016 Tanggal 12 Januari 2016 perihal Pembentukan Kampung KB dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar Nomor 476/759 S.KEP/XI /2016, maka Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki wewenang dalam pelaksanaan Program Kampung KB kemudian mengalir ke Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kelurahan Bonto Makkio menyebarkan kepada seluruh masyarakat Kelurahan

Bonto Makkio. Tidak adanya partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan awal ini maka akan berpartisipasi pada pengambilan keputusan yang sedang berlangsung.

b. Keputusan yang Sedang Berlangsung (*On going Decisions*)

Partisipasi dalam keputusan yang sedang berlangsung untuk mengetahui kebutuhan dan prioritas baru di Kelurahan Bonto Makkio yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program Kampung KB dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Petugas Lapangan Keluarga Berencana memiliki peran penting dalam menyiapkan data dan informasi tentang kebutuhan dan permasalahan strategis yang berada pada lingkungan Kampung KB untuk diajukan dalam perencanaan program dan kegiatan Kampung KB. Data dan informasi tersebut dapat diterima dari masyarakat melalui forum musyawarah Kampung KB. Forum musyawarah tersebut merupakan wadah untuk masyarakat memberikan pendapat mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dan kebutuhan di lingkungannya.

Berikut pernyataan yang diberikan oleh informan ZA mengenai partisipasi dalam keputusan yang sedang berlangsung, yaitu :

“jadi kan Kampung KB itu ada namanya forum musyawarah Kampung KB jadi apa mau dibahas mengenai pembangunan Kampung KB itu ada pertemuan rutinya, jadi disini misalnya masyarakat bisa melapor istilahnya memberikan informasilah apa-apa saja kendala mereka atau apa yang mereka butuhkan misalnya mereka disini tinggi angka pernikahan dini kita panggil dari KUA untuk penyuluhan.” (wawancara 02 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang sedang berlangsung yaitu dengan memberikan masukan mengenai apa saja yang masyarakat butuhkan. Dengan

adanya ide dan gagasan mengenai hal-hal yang dibutuhkan dimasyarakat dapat menjadikan informasi untuk pemerintah agar dapat membuat kegiatan di Kampung KB tersebut. Melalui forum musyawarah masyarakat dapat mengeluarkan pendapat yang akan memudahkan pelaksana program Kampung KB kelurahan Bonto Makkio.

Keberhasilan suatu program, bentuk dan hasilnya tidak akan lepas dari adanya putusan-putusan yaitu melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Pada tahap-tahap tertentu, keterlibatan masyarakat sangatlah dibutuhkan mengingat bahwa suatu ide, gagasan, pemikiran ataupun pendapat dari masyarakat dapat menjadi pertimbangan.

Berikut pernyataan dari informan ST, yang mengatakan bahwa :

“pengambilan keputusan adalah melibatkan dia setiap musyawarah dalam forum Kampung KB. Kalau forum Kampung KB itu ada narasumber, narasumbernya biasa dari sini atau juga kadang kita panggil Lurah” (wawancara tanggal 02 September 2018)

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan yang sedang berlangsung, masyarakat dapat dilibatkan melalui forum Kampung KB yang telah dibentuk. Tidak hanya sebagai forum untuk mengeluarkan pendapat, tetapi forum Kampung KB digunakan untuk advokasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ber-KB.

Hal ini juga dijelaskan oleh tokoh masyarakat berinisial NF yang mengatakan bahwa :

“biasanya kami ada pertemuan di lapangan atau dimana yang bisa ditempati untuk kumpul, disana kita terima kaya' penyuluhan begitu, yaa kalau kan ada penyuluhan pasti ada sesi tanya jawab atau pemberian saran, jadi kami biasa memberikan saran yahh apa saja yang perlu dilakukan

untuk mensukseskan ini Kampung KB" (wawancara tanggal 08 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat dilibatkan dalam rapat untuk membahas mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam lingkungan tersebut ataupun dapat memberikan saran bila ada penyuluhan yang dilakukan di Kampung KB tersebut. Hal ini juga dikatakan oleh kader KB berinisial NIY, bahwa :

“iya biasa ada perkumpulan setiap bulan satu kali masalah KB ini masalah Kampung KB biasa ada forum musyawarah, jadi kami biasa kumpulkan masyarakat meskipun kurang maksimal karena kan disini banyak kesibukan masing-masing” (wawancara tanggal 05 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa setiap bulan selalu ada pertemuan untuk membahas mengenai Kampung KB melalui forum musyawarah yang melibatkan masyarakat meskipun belum maksimal karena kurangnya masyarakat hadir dalam pertemuan.

Pengambilan keputusan yang sedang berlangsung dalam program Kampung KB, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk menghadiri forum musyawarah, rapat, penyuluhan serta dapat memberikan keluhan-keluhan maupun saran yang sebaiknya dilakukan untuk mensukseskan Kampung KB. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang sedang berlangsung dalam hal ini merupakan suatu keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan strategis dan keluhan yang ada dalam lingkungan Kampung KB sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk perencanaan program kegiatan kegiatan prioritas di Kampung KB. Pengambilan keputusan akan lebih baik ketika masyarakat berpartisipasi karena akan lebih banyak pemikiran orang untuk

memecahkan suatu masalah. Jika masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan maka mereka akan antusias dalam pelaksanaan program. Hakikat dari sebuah pengambilan keputusan publik merupakan hal yang mutlak jika masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang khususnya menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri. Pengambil keputusan mempunyai kepentingan atau tujuan yang berbeda, suatu keputusan yang dapat memuaskan semua pihak merupakan hal yang membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama, baik melalui interaksi, negosiasi maupun pemberian kesadaran. Forum musyawarah merupakan alternatif untuk mengumpulkan masyarakat agar dapat bertukar pikiran dan pendapat untuk mencapai mufakat untuk kepentingan masyarakat di lingkungan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang sedang berlangsung memiliki makna bahwa masyarakat ikut andil dalam penetapan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat di Kampung KB Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam tahap ini karena Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menggunakan konsep terpadu antara program KB dengan program pembangunan lainnya. Meskipun dalam suatu rapat atau forum musyawarah tersebut tidak maksimal karena sedikitnya masyarakat yang hadir karena kesibukan masing-masing.

c. Keputusan Operasional (*Operational Decisions*)

Keputusan operasional yaitu suatu keputusan yang dibuat oleh tingkat manajemen yang paling bawah. Keputusan operasional terkait dengan

pembentukan struktur organisasi yang berperan untuk melibatkan masyarakat dalam pencapaian program Kampung KB. Partisipasi dalam keputusan operasinonal berkaitan dengan hal-hal seperti komposisi keanggotaan, prosedur rapat, pemilihan kepemimpinan dan lainnya dalam program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar.

Berikut pernyataan yang berikan oleh informan kepala Balai KB yang berinisial AB, yaitu:

“kalau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program kemarin kita pengurusan pokja kelompok kerja saya libatkan saya kumpul memang semua kemudian kita diskusikan siapa bisa jadi ketua, sekretaris kemudian pelaksana seksi-seksi. Maksudnya yaa mereka terlibat berpartisipasi semua alhamdulillah” (wawancara tanggal 01 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, menjelaskan bahwa masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kepengurusan Kelompok Kerja (Pokja). Pokja merupakan kelompok manajemen tingkat paling bawah dari program Kampung KB. Masyarakat diberikan kepercayaan untuk memilih dan menentukan keanggotaan dari Pokja Kampung KB, karena masyarakat lebih mengetahui siapa saja yang dapat diberikan amanah dalam menjalankan tugas dalam kepemimpinan untuk pencapaian tujuan program Kampung KB. Hal ini juga dijelaskan oleh informan ZA mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan operasional :

“bisa dikatakan kami hanyalah sebagai fasilitator, jadi mereka semua yang ada disana itu yang kelola Kampung KB nya. Disana juga kan sudah dibentuk pokja Kampung KB jadi bentuk partisipasinya masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pembentukan pokja itu, dari ketua RW, ketua RT, tomas, toga, tokoh pemuda dan lainnya merekalah yang menunjuk siapa yang dapat diberikan amanah. Jadi pengurus yang di pokja itulah yang kami panggil dan beri informasi bahwa kita akan

melaksanakan kegiatan disana jadi nanti mereka yang panggil masyarakat untuk hadir dalam kegiatan tersebut” (wawancara tanggal 02 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, menjelaskan bahwa program Kampung KB dalam pelaksanaan dan kegiatannya dikelola oleh kelompok kerja yang dipilih oleh masyarakat. Hal ini baik untuk masyarakat karena memberikan anggapan bahwa program Kampung KB ini sebagai kegiatan milik mereka dan untuk kepentingan bersama.

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh pengurus pokja Kampung KB yaitu informan JM yang mengatakan bahwa :

“iya kami dulu disuruh kumpul untuk membahas tentang struktur organisasi tentang pengurus Kampung KB atau disebut dengan pokja Kampung KB, jadi Pak RW 06 itu jadi ketuanya karena kan memang beliau adalah orang yang memang betul-betul kami jadikan panutan lah begitu. Jadi kami menunjuk beliau untuk menjadi ketua Kampung KB dan saya juga selaku bendahara ditunjuk dari masyarakat juga” (wawancara tanggal 02 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa masyarakat diberikan sepenuhnya mengenai pengambilan keputusan dalam hal pembentukan pengurus Pokja Kampung KB. Pemilihan ketua, sekretaris, bendahara merupakan sesuatu yang dapat membuat masyarakat berpartisipasi untuk memilih pemimpin dalam pelaksanaan program Kampung KB di kelurahan Bonto Makkio.

Program Kampung KB dalam hal pengambilan keputusan operasional, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk pemilihan pengurus Kampung KB yang disebut dengan Pokja Kampung KB. Keaktifan partisipasi masyarakat dalam pemilihan ketua dan jajaran pokja merupakan suatu hal yang sangat penting agar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Partisipasi

masyarakat dalam pembentukan kepengurusan dalam hal ini Pokja sangat dibutuhkan karena program Kampung KB merupakan program pembangunan terpadu wujud dari sinergi dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program lintas sektor, agar dapat mengubah cara berfikir, sikap dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB dengan pemilihan Kepala Pokja memiliki makna bahwa pelaksanaan Program Kampung KB dapat diimplementasikan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan operasional dalam program Kampung KB sudah baik karena telah adanya struktur organisasi dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan hal ini dikarenakan adanya rasa kesadaran masyarakat sehingga ikut andil dalam program tersebut untuk berperan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan membangun keluarga kecil yang berkualitas. Adapun nama dari pokja Kampung KB Kelurahan Bonto Makkio dinamakan Pokja “Dahlia 06”.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menjalin kemitraan dan saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan program. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menunjang terlaksananya kebijakan atau kegiatan yang telah ditetapkan bersama di Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

a. Kontribusi Sumber Daya (*Resource Contributions*)

Kontribusi sumber daya dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti kontribusi tenaga, uang, materi, dan informasi dalam pelaksanaan program Kampung KB.

Berikut pernyataan yang diberikan oleh informan AB :

“jadi disana memang partisipasi masyarakatnya boleh dikatakan wah luar biasa disana pertama kalau ada kegiatan-kegiatan seperti pokoknya kalau ada kegiatan-kegiatan disana itu, kader-kader baik secara moril maupun material karena kalau ada pengecetan-pengecetan swadaya-swadaya masyarakat itu turut berpartisipasi tentang menyangkut masalah kegiatan-kegiatan Kampung KB. Jadi disana itu tidak terlalu masalah mi kalau partisipasinya baik secara fisik maupun non fisik” (wawancara tanggal 01 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB sangat baik. Partisipasi kontribusi yang diberikan oleh masyarakat tidak hanya pada tenaga tetapi juga uang maupun materi. Ada beberapa hal yang dapat dilihat dari hasil kontribusi masyarakat yaitu pada saat akan adanya pencaangan program Kampung KB, masyarakat melakukan pengecetan dan membeli peralatannya sendiri hal ini dilakukan untuk memperindah lingkungan. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat sadar akan pentingnya bekerja sama untuk membangun lingkungan yang indah dengan memberikan kontribusi uang dan tenaga.

Kontribusi sumber daya sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan program Kampung KB. Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh informan ZA :

“kalau partisipasi kontribusi yang bersifat uang hanya saya lihat itu beli cat, kalau melihat sumbangan-sumbangan dari masyarakat itu ada kan tukang angkut sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan Kampung

KB, jadi mereka sama-sama menyumbang. Kalau dalam hal informasi, kan ada kader-kader jadi mereka memberikan informasi yah seperti siapa-siapa saja masyarakat yang belum menjadi peserta KB atau belum memasang alat kontrasepsi. Kan kami juga biasa mengunjungi rumah-rumah untuk mengontrol atau mengecek ataupun berbicara mengenai pentingnya untuk ber-KB.” (wawancara tanggal 02 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kontribusi sumber daya sangat baik karena masyarakat saling bekerja sama dalam hal pembersihan keindahan lingkungan Kampung KB. Kebersihan merupakan wujud fisik dari Kampung KB, hal ini disadari oleh masyarakat yang setiap harinya membersihkan halaman rumah dan merawat tanaman untuk menciptakan suasana asri. Selain itu, masyarakat juga ikut andil untuk menjadi kader KB yang akan membantu dalam pencapaian pereserta KB. Karena tujuan utama dari pembentukan Kampung KB yaitu untuk meningkatkan peserta KB.

Sementara itu, penjelasan juga diberikan oleh tokoh masyarakat yaitu informan SR :

“kalau partisipasi kontribusi dulu itu pernah ada kegiatan penyuluhan, kami anggota Majelis Taklim pernah meminjamkan seperti kursi atau juga milik pribadi masyarakat seperti salon atau pengeras suara untuk dipinjamkan kepada pihak penyuluh Tri Bina atau kalau ada kegiatan senam lansianya yaa untuk kepentingan masyarakat juga kan” (wawancara tanggal 08 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, menjelaskan bahwa adanya partisipasi masyarakat disetiap kegiatan yang dilakukan di Kampung KB seperti pelaksanaan kelompok Tri Bina yaitu penyuluhan untuk membina masyarakat dengan meminjamkan alat untuk menunjang pelaksanaan program. Kelompok Tri Bina tersebut terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),

dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Karena belum adanya suatu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kelompok Kerja Kampung KB membuat pengurus harus mendapatkan bantuan dari masyarakat untuk meminjamkan peralatan demi kelancaran setiap kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB mengenai kontribusi sumber daya sudah baik. Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar penerima program, tetapi juga ikut andil dalam setiap kegiatan seperti kontribusi uang untuk kegiatan kebersihan lingkungan hal ini berkaitan dengan program pemerintah kota Makassar yaitu Makassar ta' Tidak Rantasa (MTR). Selain itu, juga dapat dilihat dari kontribusi masyarakat dalam hal peminjaman alat untuk kelancaran dari kegiatan di Kampung KB. Kontribusi juga di berikan oleh masyarakat dalam hal pemberian informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian peserta KB melalui PLKB maupun kader KB.

b. Program Kepesertaan Kegiatan (*Programme Enlistmen Activities*)

Kepesertaan kegiatan yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara menjadi peserta dalam kegiatan yang dilaksanakan pada program Kampung KB Kelurahan Bonto Makkio. Ada beberapa kegiatan yang masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program Kampung KB, yaitu pertemuan berkala kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), menghadiri forum musyawarah, atau kegiatan lintas sektor yang dilaksanakan di Kampung KB.

Berikut wawancara mengenai partisipasi masyarakat dalam kepesertaan kegiatan program Kampung KB, yaitu informan ZA :

“Kampung KB ini tidak hanya sebatas KB saja, akan tetapi ada namanya penyuluhan kita meng-advokasi. Ada BKB mengajak untuk mengetahui perkembangan anak secara optimal. Ada juga BKL yaitu Ibu yang punya lansia atau lansia itu sendiri untuk memelihara kesehatan. Ada BKR ini ibu yang memiliki remaja penyuluhan tentang narkoba, pendewasaan usia perkawinan, reproduksi. Terus ada juga namanya kelompok UPPKS dikumpulkan untuk mengembangkan usahanya juga tujuannya semua itu untuk menarik mereka sebagai akseptor intinya begitu, jadi semua kelompok yang ada di Kampung KB itu tujuannya untuk menjadi kan mereka sebagai peserta KB” (wawancara tanggal 02 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB dapat dilihat dari bagaimana masyarakat ikut menjadi peserta dan ikut hadir dalam kelompok kegiatan Tri Bina yaitu BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia) dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang dilakukan secara berkala setiap satu kali satu bulan. Semua kelompok kegiatan dari program Kampung KB tersebut tujuan utamanya yaitu untuk mengajak masyarakat manjadi peserta KB.

Sementara itu, penjelasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan lintas sektor dalam hal ini JM :

“Terkadang ada juga dari instansi terkait untuk memberdayakan masyarakat disini, seperti ada Bulo Badan Usaha Lorong, bagaimana kita memanfaatkan pekarangan itu bisa bermanfaat bagi keluarga, menanam apakah. Kemarin itu ada produksi cabe nya, ada juga pernah dari peternakan ada yang di kasih puyuh untuk memberdayakan, meningkatkan ekonomi” (wawancara tanggal 02 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa untuk kegiatan lintas sektor, masyarakat berpartisipasi dengan ikut menjadi peserta dalam kegiatan Badan Usaha Lorong (Bulo) yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan

yang memberikan bibit tanaman untuk membantu masyarakat dalam perekonomian.

Sementara itu, pernyataan juga diberikan oleh tokoh masyarakat yaitu informan DJ yang mengatakan bahwa :

“Meskipun saya menjual-jual, alhamdulillah saya diberikan bantuan diberikan tempat-tempat jualan karena masuk di kelompok UPPKS. Jadi kami pernah diberi bantuan untuk usaha-usaha kami. Kami juga pernah di kasi arahan-arahan tentang bagaimana supaya bisa laku jualan ta’, tapi akhir-akhir ini tidak pernah mi” (wawancara tanggal 05 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjadi peserta dari kelompok kegiatan UPPKS membantu mereka dalam usaha yang ditekuninya. Kegiatan advokasi dalam UPPKS kurang baik dikarenakan tidak teraturnya pertemuan yang dilakukan. Kebanyakan kegiatan advokasi hanya berfokus pada kegiatan kelompok Tri Bina. Pelaksanaan UPPKS dilakukan juga hanya berlaku pada masyarakat yang sudah memiliki usaha sehingga masyarakat yang baru ingin melakukan usaha tidak termasuk dalam program UPPKS. Hal ini harus menjadi pertimbangan dari pemerintah bahwa untuk kelompok kegiatan UPPKS dapat menyentuh berbagai kalangan masyarakat demi membangun jiwa wirausaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dengan pemberian advokasi, pelatihan, dan bantuan dari pemerintah dapat membantu masyarakat dalam perekonomian.

Sementara itu, pernyataan juga diberikan oleh petugas posyandu oleh informan SH, yang mengatakan bahwa :

“Setiap satu kali sebulan itu biasanya kita adakan posyandu, seperti biasa ya masyarakat yang memiliki balita datang untuk ditimbang anaknya. Partisipasi masyarakat disini sangat aktif karena banyak Ibu-Ibu yang

hadir untuk kegiatan posyandu ini. Jadi Ibu-Ibu yang ikut dalam kelompok BKB hadir kalau ada posyandu ini” (wawancara tanggal 16 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan lintas sektor dalam hal ini posyandu begitu antusias, hal ini dikarenakan masyarakat ingin memberikan yang terbaik untuk perkembangan balita mereka. Juga dengan adanya kelompok BKB masyarakat mendapatkan penyuluhan mengenai perkembangan anak. Kegiatan posyandu ini dilakukan rutin setiap satu kali sebulan yang dilakukan di lapangan yang terdapat di kelurahan Bonto Makkio. Partisipasi masyarakat dapat dilihat ketika menjadi bagian dari kegiatan posyandu tersebut dengan memberikan imunisasi pada anak balita mereka dan memeriksa kesehatan balitanya. Kegiatan ini merupakan hal yang sangat memberikan manfaat bagi masyarakat demi kesehatan balita mereka.

Partisipasi masyarakat dalam hal menjadi peserta dalam setiap program maupun kegiatan ditunjukkan dalam bentuk ikut dalam kelompok Tri Bina dan UPPKS maupun program lintas sektor lainnya. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang aktif. Kegiatan yang dilakukan di Kampung KB tujuan utamanya yaitu mengajak masyarakat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan menjadi akseptor KB dan juga mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Dengan adanya upaya dari PLKB dan bantuan dari kader KB dan pengurus Pokja Kampung KB yang senantiasa mengencarkan KB melalui advokasi kepada masyarakat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di Kampung KB untuk melaksanakan pembangunan yang dimulai dari keluarga yang tidak hanya dapat dari segi kesehatan tetapi juga sosial, ekonomi

dan lainnya. Adapun data pencapaian peserta KB aktif kelurahan Bonto Makkio tahun 2018:

Tabel 4.6. Data Pencapaian Peserta KB Aktif Kelurahan Bonto Makkio Tahun 2018

No.	RW	PUS	BULAN									
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT
1.	01	64	45	45	46	46	46	46	46	46	46	47
2.	02	79	51	51	51	51	52	52	52	52	52	52
3.	03	133	93	93	95	95	95	96	96	96	96	96
4.	04	114	68	68	70	71	71	71	70	71	71	71
5.	05	74	52	53	53	54	55	55	55	55	55	56
6.	06	84	49	49	48	48	48	48	49	50	51	51
KELURAHAN		548	358	359	361	365	367	368	368	370	371	373

(sumber : Data Kampung KB Bonto Makkio, 2018)

Keterangan :

PUS = Pasangan Usia Subur

RW = Rukun Warga

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian peserta KB di Kelurahan Bonto Makkio memiliki jumlah peserta KB sebanyak 373 orang sampai bulan Oktober 2018. Peserta KB Kelurahan Bonto Makkio hampir setiap bulannya mengalami penambahan peserta KB. Namun, peningkatan peserta KB Kelurahan Bonto Makkio saat ini terlihat belum signifikan. Hal ini dikarenakan masyarakat belum memiliki waktu untuk berkonsultasi kepada PLKB maupun kader KB karena kesibukan masing-masing.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi yaitu masyarakat ikut serta dalam mengevaluasi program Kampung KB untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya guna perbaikan maupun penambahan pelaksanaan program selanjutnya. Evaluasi memiliki peranan penting dalam keberhasilan suatu pelaksanaan program, dengan evaluasi akan mengetahui hal-hal yang dapat menunjang dan hal-hal yang menghambat dari pelaksanaan suatu program.

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi langsung dalam evaluasi yaitu partisipasi yang secara langsung terlibat dalam mengevaluasi program Kampung KB. Evaluasi ini perkembangan dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi program serta anggarannya dilaporkan secara rutin.

Berikut wawancara yang dilakukan kepada informan ST yang berkaitan dengan evaluasi program Kampung KB, mengatakan bahwa :

“Masyarakat pada umumnya itu tidak dilibatkan, karena baik dari DPPKB maupun dari masing-masing dinas terkait yang telah melakukan program kegiatan di Kampung KB yang berhak mengevaluasi. Tapi kalau pelaporan tentang perkembangan program itu memang dilakukan oleh ketua Kampung KB” (wawancara tanggal 20 September 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa masyarakat tidak secara langsung dapat berpartisipasi dalam evaluasi karena hanya dapat dilakukan oleh dinas terkait dalam melakukan evaluasi. Namun dalam hal pelaporan, ketua Kampung KB akan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi dari suatu program di Kampung KB. Tujuan evaluasi untuk mendapatkan suatu gambaran tentang hasil dan manfaat yang berkaitan dengan program.

Sementara itu, penjelasan juga diberikan oleh informan ZA yang mengatakan bahwa :

“Hmm.. kalau evaluasi sih tidak ada dek dilibatkan masyarakat. Karena kan evaluasi menggunakan metode-metode tertentu. Beda dengan kalau seperti pemberian informasi bilang ini program sudah berjalan, ini belum atau kah ada yang masih kurang jadi hanya sebatas itu saja” (wawancara tanggal 02 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi program. Namun dapat berpartisipasi dalam melaporkan kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB.

Evaluasi program merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informai yang mengimplementasikan suatu kebijakan yang melibatkan sekelompok orang untuk pengambilan keputusan. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencapaian tujuan dari suatu program yang telah dilaksanakan. Hasil dari suatu evaluasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut ataupun untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan program, apabila tujuan belum terlaksana maka evaluator akan mencari tahu dimana letak kekurangan dari program tersebut. Indikator dari evaluasi program merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui apakah program tersebut telah berhasil ataupun belum. Program Kampung KB Kelurahan Bonto Makkio dalam hal evaluasi dengan partisipasi langsung tidak dilibatkan. Hal ini dikarenakan evaluator program merupakan orang yang memiliki kompetensi yang dipercaya oleh instansi untuk melakukan evaluasi. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016, Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Adapun partisipasi masyarakat dalam hal pelaporan kegiatan dan realisasi program dilakukan oleh ketua Pokja Kampung KB.

b. Partisipasi Tidak Langsung

Evaluasi dapat dilakukan melalui partisipasi tidak langsung yaitu masyarakat berpartisipasi dalam hal memberikan informasi agar pemerintah mendapatkan gambaran tentang hasil dan manfaat serta perkembangan kegiatan yang dilakukan di Kampung KB.

Berikut pernyataan yang diberikan oleh informan ZA mengenai partisipasi masyarakat secara tidak langsung dalam evaluasi program Kampung KB, yaitu :

“Masyarakat dapat berpartisipasi dalam evaluasi melalui kegiatan forum musyawarah atau rapat pokja Kampung KB. Mereka dapat menyampaikan apa saja hal-hal yang selama ini program yang mesti di tingkatkan atau apa saja yang kurang selama kegiatan Kampung KB ini” (wawancara tanggal 02 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa untuk bentuk partisipasi dalam hal evaluasi dapat dilakukan melalui pemberian penilaian ataupun pendapat tentang suatu program kegiatan yang dilakukan dalam Kampung KB. Hal ini juga dijelaskan informan AB, yang mengatakan bahwa :

“Evaluasi itu kan dilakukan untuk melihat bagaimana program-program telah terlaksana. Jadi mengenai partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini tentu dilibatkan namun tidak dengan secara langsung, seperti menilai program atau menilai penyuluh itu dilakukan kalau ada seperti loka karya atau forum musyawarah Kampung KB” (wawancara tanggal 01 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa dengan menilai suatu pencapaian program dapat dilakukan melalui loka karya atau forum musyawarah.

Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat secara tidak langsung ikut dalam mengevaluasi kegiatan dari program Kampung KB.

Sementara itu, informan NIY mengatakan bahwa :

“Kalau memberikan pendapat tentang perkembangan program Kampung KB, yaa kami ikut berpartisipasi dan disampaikan kalau ada rapat pokja atau forum musyawarah” (wawancara tanggal 05 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB harus melibatkan masyarakat dalam hal evaluasi melalui partisipasi tidak langsung untuk menilai bagaimana pencapaian suatu program Kampung KB.

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi program Kampung KB masyarakat berpartisipasi secara tidak langsung dengan menilai program juga memberikan saran apa saja yang kurang dalam program Kampung KB. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan kegiatan program yang akan datang. Pelaksanaan program Kampung KB membutuhkan partisipasi masyarakat dari semua pihak terkait agar dapat menilai apa saja yang kurang dalam suatu program dan apa saja yang dapat di lakukan dan ditambah dari suatu program Kampung KB Kelurahan Bonto Makkio.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dapat dilihat dari tiga bentuk keputusan: Partisipasi masyarakat dalam Keputusan Awal tidak dilibatkan. Pengambilan keputusan yang sedang berlangsung, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk menghadiri forum musyawarah, rapat, atau penyuluhan dan dapat memberikan keluhan-keluhan maupun saran yang sebaiknya dilakukan untuk mensukseskan Kampung KB. Meskipun dalam suatu rapat atau forum musyawarah tersebut tidak maksimal karena sedikitnya masyarakat yang hadir karena kesibukan masing-masing. Pengambilan keputusan operasional, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk pemilihan pengurus Kampung KB yang disebut dengan Pokja Kampung KB. Keaktifan partisipasi masyarakat dalam pemilihan ketua dan jajaran pokja merupakan suatu hal yang sangat penting agar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan, dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu Partisipasi masyarakat dalam kontribusi sumber daya berupa uang untuk kegiatan kebersihan lingkungan. Selain itu, juga dapat dilihat dari kontribusi masyarakat dalam hal peminjaman alat untuk kelancaran dari kegiatan di

Kampung KB. Kontribusi juga di berikan oleh masyarakat dalam hal pemberian informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian peserta KB melalui kader KB. Partisipasi masyarakat dalam hal menjadi peserta dalam setiap program maupun kegiatan ditunjukkan dalam bentuk ikut dalam kelompok Tri Bina dan UPPKS maupun program lintas sektor lainnya. Kegiatan yang dilakukan di Kampung KB tujuan utamanya yaitu mengajak masyarakat untuk menjadi peserta KB.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi, yaitu Partisipasi langsung dalam evaluasi masyarakat belum dilibatkan. Namun, dalam hal pelaporan kegiatan dan realisasi program dilakukan oleh ketua Kampung KB. Evaluasi program Kampung KB masyarakat berpartisipasi secara tidak langsung dengan menilai program juga memberikan saran apa saja yang kurang dalam program Kampung KB. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan kegiatan program yang akan datang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan masalah-masalah yang ditemui saat melakukan penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar, yaitu :

1. Diharapkan kepada pemerintah, instansi terkait dan lintas sektor agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi permasalahan masyarakat dan membantu meningkatkan kualitas masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. Perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Program Kampung KB agar masyarakat mempunyai rasa memiliki dan ikut andil dalam Program Kampung KB di Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar.
3. Perlunya pelatihan keterampilan pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan memaksimalkan pertemuan agar masyarakat mampu membuat usaha untuk meningkatkan perekonomian.
4. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan program pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan penduduk dan menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui ikut dalam Program Keluarga Berencana dan kelompok kegiatan di Kampung KB.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif ; Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Calpulis.
- Andreeyan, Rizal. 2014. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. <http://ejournal.an.fisip-unmul.org/>. eJournal Administrasi Negara. Vol. 2, No. 4.
- Anwar, Sakaria J. 2009. *Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Makassar. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 15, No. 3.
- Arzaq, Mohammad Yassir dan Tauran. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif Di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik*. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11881>. eJournal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 3, No. 5.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2015. *Petunjuk Teknis Kampung KB* : BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2017. *Pedoman Pengelolaan Kampung KB* : BKKBN.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2018. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2017*. Makassar : BPS Kota Makassar.
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 2018. *Daftar PLKB Kota Makassar*. Makassar : DPPKB Kota Makassar.
- Hamijoyo. 2007. *Partisipasi Dalam Pembangunan*. Jakarta : Depdikbud.
- Igrisia, Irawaty. 2008. *Mewujudkan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Makassar. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 14, No. 3.
- Kalesaran, Ferdinan, Rantung, Ventje V dan Pioh, Novi R. 2015. *Partisipasi Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado*. <https://media.neliti.com/media/publications/90316-ID-partisipasi-dalam-program-nasional-pembe.pdf>. eJournal Vol. 4, No. 5.
- Kristiniati, Rahayu dan Choiriyah, Ilmi Usrotin. 2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo*.

- Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 2, No. 2.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muluk, M.R. Khairul. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia.
- Paath, Stephanie Regina Setya Ningtyas. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Elektronik Rukun Tetangga Warga (e-RT/RW) Di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya*. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/3273/5536/>. *eJournal Administrasi Negara*. Vol. 1, No. 3.
- Puspaningtyas, Niken Septihandini, Warsono, Hardi dan Marom, Aufarul. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Pedurungan*. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/4362/>. *eJournal of Public Policy and Management Review*. Vol. 3, No. 1.
- Putri, Primadini. 2010. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Kredit Mikro Nagari Melalui Pla Baitul Maal Wat Tamwil*. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/598>. *eJournal Kebijakan Publik*. Vol.1, No. 2.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*.
- Republik Indonesia. *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

Widodo, Teguh. 2015. *Pembangunan Endogen : Mengabaikan Peran Negara Dalam Pembangunan*. Yogyakarta : Deepublish.

L

A

M

P

I

R

A

N

Dokumentasi



Wawancara kepada informan PLKB Kelurahan Bonto Makkio (sebelah kanan) dan informan tokoh masyarakat selaku pengurus Kelompok Kerja Kampung KB (tengah) pada 02 Oktober 2018 di Kampung KB Kelurahan Bonto Makkio RW 06.



Wawancara kepada informan tokoh masyarakat Kelurahan Bonto Makkio selaku Kader KB pada 05 Oktober 2018 di Kelurahan Bonto Makkio.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nopiyanti lahir di Ujung Pandang pada Tanggal 17 November 1996, merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Kamiluddin dan Ibunda Rosmiati. Penulis memulai pendidikan di SDN Centre Mangalli dan lulus pada Tahun 2008, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke MTs. Aisyiyah Sungguminasa dan selesai pada tahun 2011, dan setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pallangga dan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dan selesai pada tahun 2014. Setelah melewati pendidikan SMK dan lulus pada tahun 2014, pada awal Agustus 2014 telah tercatat sebagai Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Makassar, lulus pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan pada akhirnya Penulis menyelesaikan Pendidikan Srata 1 (satu) di Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2019.